

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Boyolali (Studi Tenaga Pendidik Jenjang Sekolah Dasar Kategori Penggerak)

Obed Toman Susanto*), Rina Martini**), Bangkit Aditya Wiryawan***)
Email : obedtomansusanto@students.undip.ac.id

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro,
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 7465407
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum baru yang disahkan pada tanggal 11 Februari 2022 sebagai bagian dari peluncuran Merdeka Belajar Episode 15. Kurikulum yang disahkan oleh Kemenristekdikti dibawah arahan Nadiem Anwar Makarim ini cukup erat kaitannya dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Penulis melakukan studi kesiapan implemementasi di Kabupaten Boyolali melalui metode Kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, studi pustaka dan studi audio. Subjek penelitian terdiri dari 10 Sekolah Dasar Kategori Penggerak yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Boyolali serta 21 informan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian sekolah dasar sangat terbantu dengan adanya Insentif dana Program Sekolah Penggerak sebesar 80 juta di tahun pertama untuk digitalisasi pendidikan. Tanpa adanya dana ini, sebanyak 8 sekolah belum siap dalam implementasi kurikulum ini secara penuh di satuan pendidikannya. Kendala dan tantangan terbesar terlatak pada proses adaptasi teknologi di satuan pendidikan demi tuntutan transformasi digitalisasi bidang pendidikan.

Penulis menyarankan kepada tenaga pendidik dan pelaku kebijakan untuk terus dapat beradaptasi menjadi pembelajar seumur hidup dan merevolusi pola pikir/ mindset seiring perubahan zaman. Tantangan kedepannya ialah bagaimana menumbuhkan sikap saling memiliki (*sense of belongings*) bagi semua pihak di satuan pendidikan dalam menjaga dan merawat fasilitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

Kata kunci : kurikulum merdeka, iptek, digitalisasi pendidikan, sekolah penggerak

ABSTRACT

The Merdeka Curriculum is a new curriculum that was approved on February 11 2022 as part of the launch of Merdeka Belajar Episode 15. The curriculum, which was approved by the Ministry of Research, Technology and Higher Education under the direction of Nadiem Anwar Makarim, is quite closely related to Science and Technology (IPTEK).

The author conducted a study of implementation readiness in Boyolali Regency using qualitative methods with in-depth interviews, field observations, literature studies and audio studies. The research subjects consisted of 10 Activator Category Elementary Schools spread across 10 Districts in Boyolali Regency and 21 informants.

The research results prove that some elementary schools were greatly helped by the School Mobilization Program funding incentive of 80 million in the first year for the digitalization of education. Without this funding, as many as 8 schools would not be ready to fully implement this curriculum in their educational units. The biggest obstacles and challenges lie in the process of adapting technology in educational units to meet the demands of digital transformation in the education sector.

The author advises educators and policy actors to continue to be able to adapt to become lifelong learners and revolutionize their thinking/mindset as times change. The challenge for the future is how to foster an attitude of mutual belonging (sense of belonging) for all parties in the education unit in maintaining and caring for the facilities and infrastructure that support education.

Keywords : independent curriculum, science and technology, education digitalization penggerak school

PENDAHULUAN

Kurikulum berperan vital sebagai jantung suatu sistem pendidikan. Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali sejak proklamasi kemerdekaan (Aprima, 2022). Pada tanggal 10 Desember 2019, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengubah dan menetapkan kurikulum merdeka yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2013 (Rahmadayanti, 2022). Konsep Kurikulum Merdeka juga biasa disebut dengan “Merdeka Belajar” ini banyak mendapat respons positif serta negatif ditengah peluncurannya ditengah pandemi covid-19 yang mengubah paradigma dan sistem pembelajaran di Indonesia (Sunarni, 2023).

Jika kita sudah mempunyai konsep yang baik, maka 60% keberhasilan sudah di tangan. Namun yang 60% itu pun akan hangus jika 40% implementasinya tidak konsisten dengan konsep. Malangnya lagi banyak peneliti yang menemukan bahwa dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsisten implementasinya antara 10-20% saja. (Nugroho, 2021). Akankah kurikulum baru ini mengatasi masalah prioritas dalam bidang pendidikan seperti kesenjangan tenaga pendidik, sarana prasarana dan pengawasan alokasi dana daerah yang rendah? (Syahrani, 2019; Hidayat, 2017). Apakah kurikulum yang digodok pemerintah ini dapat mengatasi learning loss di tengah keterpurukan tingkat pendidikan Indonesia serta mengadaptasi IPTEK yang menjadi salah satu masalah krusial di dunia pendidikan ? (Sista, 2018; Nugraha, 2022)

Provinsi Jawa Tengah meningkat posisi ketiga yang memiliki Sekolah Dasar terbanyak dari total 34 Provinsi di Indonesia yakni sebanyak 18.732 dibawah Provinsi Jawa Barat disusul Jawa Timur (Kemdikbud, 2023). Namun, sayangnya per April 2023, baru terdapat 843 dasar yang berkategori sekolah penggerak di Provinsi Jawa Tengah dan hanya

terdapat 31 sekolah dasar yang berkategori sekolah penggerak dari total 584 sekolah dasar yang tersebar di Kabupaten Boyolali. (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini juga terjadi di beberapa Kabupaten di Jawa Tengah yang hanya memiliki puluhan jenis sekolah penggerak dari ribuan total sekolah jenjang SD. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk lebih mengkaji dan meneliti kesiapan implementasi kurikulum baru ini. Kesiapan IPTEK, para tenaga pendidik, keadaan sarana prasarana/ fasilitas pendidikan juga patut diuji demi tercapainya IKM secara optimal di Kabupaten Boyolali. Pengaruh IPTEK juga dapat mendukung atau menghambat keberhasilan dari suatu kebijakan, tak terkecuali kebijakan kurikulum di dunia pendidikan (Ramadhan, 2022)

Dalam membantu para tenaga pendidik untuk lebih memahami esensi kurikulum merdeka, Kemendikbudristek menyediakan wadah yang dinamakan “Platform Merdeka Mengajar”. Wadah ini merupakan alat bantu berupa materi pengajaran, video inspirasi mengajar, bahan uji kompetensi, wadah berbagi komunitas pengajar, dan hal-hal dasar lainnya terkait profil pelajar pancasila, capaian pembelajaran dan beberapa dokumen. Namun, dalam penelitian yang dilakukan Zzulfa (2022), ditemukan fakta bahwa ada keterbatasan limit jumlah pengunjung/kuota dalam mengakses platform itu yang mengakibatkan kurang optimalnya guru sebagai tenaga pengajar dalam memanfaatkan platform merdeka mengajar, oleh karena itu, penting untuk segera dilakukan studi terkait implementasi kurikulum merdeka ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Penulis melakukan studi implemmentasi di Kabupaten Boyolali melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi pustaka dan studi audio. Subjek penelitian terdiri dari 10 Sekolah Dasar Kategori Penggerak yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Boyolali serta 21

informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, kepala dinas dan kepala seksi kurikulum jenjang sekolah dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Peneliti menggunakan kerangka teori dari model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (1970) dalam Nugroho (2021). Penelitian ini juga menganalisis pola implementasi antar aktor terdampak kebijakan melalui pendekatan bottom up dan manajemen jaringan. Penulis membagi dua pihak yang terdampak pada kebijakan ini secara langsung (internal) dan yang tidak terdampak secara langsung (eksternal). Pihak internal terdiri dari guru dan kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, fasilitator yang ditunjuk oleh Kemenristekdikti, serta pengawas sekolah/ penilik. Pihak eksternal terdiri dari orang tua siswa.

PEMBAHASAN

Kemendikbudristek ketika meluncurkan Kurikulum Merdeka sebagai episode ke-15 dari Program Merdeka Belajar, juga turut serta meluncurkan 'Platform Merdeka Mengajar' (PMM) sebagai alat bantu/ perangkat ajar yang dipercaya dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum baru ini di lapangan. Platform Merdeka Mengajar ini tentunya hanya dapat diakses melalui koneksi internet dan perangkat elektronik yang ada (gawai, laptop, dan komputer). Hal ini tentunya menjadi tantangan di berbagai satuan pendidikan dan tenaga pendidik yang tersebar diseluruh penjuru Tanah Air yang belum terpenetrasi oleh sarana- prasarana teknologi dan akses internet. Platform ini dapat diunduh di aplikasi playstore dan juga dapat diakses di website <https://guru.kemdikbud.go.id/>

Program Merdeka Belajar ini juga meluncurkan Program Sekolah Penggerak (PSP) sebagai episode ke-7 Program Merdeka Belajar pada tanggal 1 Februari 2021. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui

terciptanya Pelajar Pancasila, dalam arti lain, Program ini bertujuan untuk menyukseskan kurikulum baru yang telah dirancang Kemendikbudristek yang masih dinamakan Kurikulum Prototipe.

Dalam praktiknya sudah banyak sekolah yang tertarik dan mengikuti seleksi yang diwakilkan oleh kepala sekolahnya, namun, masih terganjal di kendala administrasi hingga wawancara pengalaman memimpin. Juga banyak sekolah yang belum mengetahui terkait program ini dan malas mendaftar karena beban administrasi yang cukup banyak yang wajib dipenuhi sebagai calon peserta. Program ini memang memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh para satuan pendidikan di Sekolah, selain mendapat pendampingan langsung oleh fasilitator (pihak yang ditunjuk langsung oleh kemendikbud) untuk membantu penyelenggaraan suatu sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, namun, penulis merasa paling yang membuat lebih menarik ialah manfaat insentif/ Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dari Program Sekolah Penggerak ini sebanyak Rp. 80.000.000,00 di tahun pertama kemudian Rp 30.000.000,00 di tahun kedua dan Rp 15.000.000,00 sampai dengan Rp 20.000.000,00 di tahun ketiga setelah dinyatakan lulus sebagai peserta PSP.

Kurikulum ini membutuhkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses pemahaman dan penerapannya di lapangan. Telah dijelaskan pada bagian diatas tentang Platform Merdeka Mengajar yang diharapkan dapat dipakai sebagai alat bantu tenaga pendidik di satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini demi mencapai tujuan yang di dambakan pemerintah pusat.

Penulis akan membahas hasil temuan di lapangan dengan menggunakan pisau analisis teori Model Implementasi Brian

W.Hoogwood dalam Nugroho (2021), yakni sebagai berikut :

A. Analisis adanya dukungan/ tidak dari pihak eksternal terhadap perubahan kurikulum (penerimaan/penolakan) dan pola ketergantungannya (besar/ kecil).

Hal pertama yang penulis alami ialah respons dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali tentang Kurikulum Merdeka serta strategi yang pihak ini rencanakan kedepannya dalam menjawab tantangan dan kendala implementasi di lapangan. Konsep kurikulum merdeka menurut Darmanto, Kadin Disdikbud Kabupaten Boyolali, ada 2 yaitu anak belajar sesuai potensi minat dan bakatnya (semua dihargai), dan merupakan alat mitigasi/ pencegahan atas dampak pandemi Covid19 yang menyebabkan *learning loss*. Ia mengakui hal tersebut sebagai salah satu tantangan bagi jajarannya untuk dapat menumbuhkan sikap kompetisi/ persaingan diantara peserta didik untuk meraih prestasi menuju dunia kerja nantinya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terus berupaya berkoordinasi dan bekerjasama dengan fasilitator dalam melakukan perencanaan dan pendampingan program sekolah, monitoring dan evaluasi Sekolah Penggerak (pelaporan kinerja). Dinas juga memberikan pendampingan bagi sekolah dasar yang ingin mengikuti seleksi sekolah penggerak dan memfasilitasi adanya kegiatan berbagi praktik baik dan pengimbasan dari Sekolah Penggerak ke Sekolah non-penggerak. Dinas juga berusaha mengupayakan untuk memotivasi dan mendorong tenaga pendidik yang cenderung belum melek teknologi melalui workshop dan pelatihan online maupun offline tentang pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) pada seluruh tenaga pendidik dan kepala sekolah di 22 Kecamatan di Kabupaten Boyolali.

Hal kedua yang ingin ditelisik oleh penulis pada poin ini ialah peran Fasilitator yang ditunjuk oleh Kemendikbudristek RI dan Penilik/ Pengawas dalam mendukung keberhasilan program kebijakan kurikulum merdeka. Memang sudah ada beberapa fasilitator yang melakukan pendampingan dan penyuluhan dengan tujuan kurikulum baru ini dapat diterapkan secara maksimal di satuan pendidikan. Tetapi, masih ada beberapa Sekolah Dasar yang belum pernah di datangi langsung (on-site) oleh fasilitator yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu dan hanya melakukan pembelajaran dan konseling via online. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru dan kepala sekolah, penulis menilai hal ini dapat mengurangi efektivitas dan optimalisasi keberhasilan kurikulum merdeka ini mengingat pihak fasilitator hanya mendengar suatu kabar/ situasi- kondisi berdasarkan pengakuan guru dan kepala sekolah tanpa melihat langsung situasi-kondisi di lapangan.

Disamping kekurangan yang ada, beberapa tenaga pendidik juga lebih merasa didukung/ lebih diperhatikan oleh fasilitator yang ditunjuk oleh kemendikbudristek ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun lalu sebelum menjadi sekolah dasar kategori penggerak. “Lebih semangat dan senang karena motivasi dari pihak ketiga (fasilitator)”, kata Jumeiri, selaku Kepala Sekolah SDIT Al Firdaus Nogosari. Memang penulis mengakui dengan adanya pemantauan secara berkala (via online maupun offline), guru dan kepala sekolah ditantang untuk terus berbenah dan berinovasi demi mengadaptasi tujuan pencapaian pada kurikulum baru ini.

Hal terakhir yang ingin penulis dalam ini ialah pola ketergantungan pihak eksternal dan internal. Penulis menilai pola ketergantungan antara pihak guru, dinas dan fasilitator sangat tinggi apalagi di tahun-tahun awal pendampingan (tahun pertama dari total pendampingan selama 3 tahun hingga bisa dikatakan mandiri) melalui pelatihan online, in home training (IHT), bahkan bukan hanya dilakukan pemantauan/ penilaian kelayakan seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan ada suatu bentuk komunikasi dalam *forum group discussion/ FGD* yang berlangsung 2 arah, sehingga guru tidak merasa ditekan karena penilaian sepihak/ terlalu disetir oleh kemauan orang lain serta lebih merasa bebas dari rasa takut dan cemas karena ketidakmampuan melaksanakan kurikulum baru ini secara penuh dan sempurna. FGD ini bersifat diskusi bukan penilaian, sehingga guru merasa sangat penting bagi fasilitator untuk dapat rutin berdiskusi terkait pengalaman dan solusi dari kekurangan implementasi di lapangan.

B. Analisis kualitas Sumber Daya Manusia (tupoksi yang dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar), dan proses waktu implementasi apakah terburu-buru/ tidak.

Hal pertama yang ingin diteliti pada poin ini ialah respons dari Tenaga Pendidik di Sekolah Dasar Penggerak Kabupaten Boyolali. Penulis sudah mewawancarai setidaknya 21 orang tenaga pendidik (yang terdiri dari guru wali kelas dan kepala sekolah) yang terdampak dari kebijakan Kurikulum Merdeka ini Hasilnya ketika penulis bertanya kepada informan untuk memberikan skala nilai 1-10 terkait penerimaan/ kesetujuan pada kurikulum merdeka ini ialah mayoritas informan menerima kebijakan ini (15 orang) , tunduk akan kebijakan yang sudah diputuskan oleh ahli/ atasan mereka serta pasrah dengan keadaan/ menerima setengah hati yakni sebanyak 6 orang. Rata-rata nilai berada di rentang angka 6-7 poin.

Penulis menemukan adanya tenaga pendidik yang merasa terganggu terhadap kurikulum baru ini karena dirasa Kurikulum 2013 belum menguasai, tiba-tiba ada kurikulum baru lagi yang mau tidak mau harus mengulang lagi dari awal. Penulis juga menemukan salah seorang guru senior yang berusia 58 tahun di salah satu satuan pendidikan di Kecamatan Juwangi, ketika di wawancara mengaku bahwa ia sedikit kesulitan dalam beradaptasi mengikuti prosedur Kurikulum Merdeka ini. Ia mengaku bahwa dalam beberapa kali kesempatan, dirinya terpaksa meminta bantuan guru lain di sekolahnya dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya pada Platform Merdeka Mengajar/ PMM. Penulis juga menemukan kepala sekolah yang terus menerus belajar dan mengikuti perubahan teknologi. Ia mengaku bahwa ia berusaha sekuat tenaga dan pemikiran untuk menjadi seorang ‘pembelajar sepanjang hayat’. Hal ini memang bukan omong belaka, hal ini terbukti ketika penulis mengecek sertifikat yang berhasil ia dapatkan ketika mengikuti pelatihan di Platform Merdeka Mengajar/ PMM. Ia berhasil mendapatkan 27 sertifikat yang juga menurutnya merupakan yang terbanyak se Kabupaten Boyolali saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 12 Juli 2023.

Hal kedua yang hendak penulis dalam pada poin ini ialah kondisi sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik di satuan pendidikan sekolah dasar. Peneliti menguji pengetahuan tenaga pendidik dan kepala sekolah pada hal Platform Merdeka Mengajar/ PMM. Hasilnya, peneliti setidaknya menemukan ada beberapa tenaga pendidik di 3 sekolah dasar penggerak dari 10 sampel penelitian yang kurang mengetahui esensi bahkan tidak mengetahui isi dari platform tersebut. Peneliti merasakan hal ini tidak wajar, mengingat 3 sekolah ini merupakan sekolah model/ teladan seharusnya sudah lebih maju kesiapannya dalam membumikan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Kurikulum baru yang dirancang oleh pemerintah, sangat erat kaitannya dengan teknologi dan informasi serta telekomunikasi (IP-TIK).

Hal ketiga yang hendak penulis bahas ialah momentum pelaksanaan kurikulum baru pasca pandemi Covid-19. Hasilnya penulis menilai proses kurikulum merdeka ini (khususnya implementasi di lapangan) tidak terburu-buru secara keseluruhan mengingat pandemi Covid19 yang berdampak luas di sektor pendidikan, bahkan ada tenaga pendidik yang mengeluhkan sikap anak didiknya yang menjadi kurang sopan pasca pandemi. Hal ini mengakibatkan memang sudah seharusnya ada transformasi di bidang pendidikan demi menyelaraskan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang relatif terus berubah. Hal ini juga mendorong satuan pendidikan/guru untuk terus berinovasi dan kreatif dalam mengajar khususnya demi tujuan mengejar ketertinggalan pendidikan di Indonesia.

Penulis juga menilai pelaksanaan transformasi pendidikan ditengah kebijakan penerapan belajar dirumah merupakan hal yang sangat tepat untuk dilakukan. Penelitian Bank Dunia juga telah membuktikan terkait dampak *learning loss* yang sudah sempat disinggung oleh peneliti di bagian pendahuluan. Perubahan paradigma pembelajaran secara cepat menuntut tenaga pendidik serta orang

tua berinovasi dan lebih berpikir kritis demi tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dimanapun anak didik mereka berada. Adaptasi teknologi pendidikan memang harus segera dilakukan dan dioptomalkan secara positif sebelum anak didik hanyut oleh dampak negatif dari IPTEK itu sendiri ketimbang menjauhkan dan menghindari teknologi itu di kehidupan sehari-hari. Namun, memang penulis menemukan banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik di lapangan, salah satunya ialah sudah banyaknya peserta didik dari sampel sekolah penggerak yang diteliti oleh penulis, kecanduan terhadap game online maupun offline karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari orang tua maupun guru itu sendiri. Dampaknya, anak didik dan juga tenaga pendidik mengalami kesulitan dalam mengejar adaptasi dan penyesuaian sesuai kehendak tenaga pendidik karena sang anak sudah terbiasa dalam penggunaan IPTEK untuk keperluan hobi dan kesenangan pribadi dalam mengisi waktu luang.

C. Analisis hubungan keterkaitan antar elemen (komunikasi antar tenaga pendidik, optimalisasi penggunaan IPTEK) beserta efektivitas/ dampak yang dirasakan.

Hal pertama yang hendak dibahas ialah hubungan antara guru dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Darmanto, mengaku terus berupaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh elemen satuan pendidikan yang tersebar di wilayah tanggung jawabnya. Ia mengaku bahwa seluruh satuan pendidikan di 22 Kecamatan sudah siap semua dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, "*yang paling penting kita tunjukan keberpihakan kita kepada mereka*", ucap Darmanto ketika ditemui di kantornya (20/02/2023). Darmanto juga berpendapat bahwa semua sarana-prasarana cukup dalam

hal akses masuk sekolah hingga ke ujung gunung (bukan sapsras digitalisasi sekolah). *“Kami memperhatikan semua hal itu karena merupakan hal yang vital”* (SDM, Sapsras, dan kurikulum), ucap Darmanto.

Penulis juga bertanya kepada tenaga pendidik serta kepala sekolah terkait hubungan mereka selama ini dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Boyolali. Hasilnya rata-rata tenaga pendidik memiliki hubungan yang baik dengan penilik/ penjamin mutu dan evaluasi pendidikan di satuan pendidikan tempat ia mengajar. Penulis tidak menemukan keluhan dari guru yang disampaikan terkait penilik/ pengawas Sekolah Dasar selama kurun waktu setahun terakhir. Salah satu penilik sekolah Dasar di Kabupaten Boyolali, Kuswinarni misalnya, mengaku bahwa ia dan teman-teman pengawas akan terus mendorong guru dan kepala sekolah sebagai garda terdepan sekolah percontohan dalam mengimplementasikan kurikulum baru ini melalui pelatihan, bertukar pikiran terkait kendala dan masalah yang dialami tenaga pendidik hingga bantuan modal berupa uang jika diperlukan.

Hal kedua ialah hubungan antara guru dengan fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Hasilnya dari pengakuan salah satu guru wali kelas I di satuan pendidikan Kecamatan Kemusu, ia menganggap fasilitator masih tebang pilih dalam memfasilitasi dan memberikan ilmu bagi semua tenaga pendidik di satuan pendidikan yang diampu. ia merasa iri hingga canggung terhadap kecakapan yang ia miliki (bahkan dapat dikatakan sebagai keterbatasan mengajar) akibat kurangnya rasa percaya diri. Solusi dari guru yang kurang motivasi di sekolah penggerak ialah ia hanya bisa memotivasi dirinya sendiri untuk terus belajar dan bergerak beradaptasi dengan teknologi seiring perubahan zaman secara mandiri (otodidak).

Penulis menganggap hal ini tidak wajar mengingat sekolah penggerak ialah model satuan pendidikan yang dijadikan sebagai

teladan/percontohan bagi satuan pendidikan lainnya di sekitar, namun, dukungan dari fasilitator belum bersifat menyeluruh ke semua guru bahkan pihak sekolah. Bahkan, setelah ditelusuri oleh peneliti, fasilitator ternyata belum pernah mengunjungi sekolah yang ia ampu karena berada di daerah pedalaman Boyolali (komunikasi hanya bersifat online) karena kesibukan fasilitator yang merangkap jabatan. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi implementasi kebijakan yang baru. Secara garis besar penulis berpendapat memang selama ini rata-rata fasilitator yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, namun belum optimal karena masih terdapat kendala dalam kurangnya koordinasi dan keterbatasan komunikasi di lapangan

Hal ketiga peneliti hendak mendalami respons orang tua/ wali murid terhadap perubahan paradigma pembelajaran dan hubungan mereka dengan guru. Hasilnya respons orang tua/ murid terbelah, sebagian setuju dan mendukung kurikulum baru ini, sebagian lagi pesimis terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh kurikulum ini. Penulis memetakan rata-rata orang tua/ wali murid yang pesimis, terletak di daerah pinggiran Kabupaten Boyolali yang rata-rata memiliki pekerjaan informal seperti petani. Peneliti bahkan menemukan orangtua yang tidak setuju anak didiknya jika sampai belajar ke sawah (turun lapangan) ketika Pelajaran P5 dan lebih memilih untuk duduk rapih di bangku sekolah mengikuti instruksi dari gurunya. Tenaga pendidik merespons hal ini dengan tetap memilih teguh dan patuh terhadap esensi kurikulum Merdeka yang lebih menggali minat dan bakat peserta didik dengan cara turun ke lapangan sesuai arahan dari fasilitator. Penulis menilai bahwa para orang tua belum menyadari fungsi edukatif bermain bebas.

Repons positif tentunya juga di dapatkan oleh penulis ketika melakukan pengumpulan data di lapangan. Penulis paling tertarik terhadap

dukungan dan dorongan yang dilakukan oleh orangtua/ wali murid yang mempercayakan anak didiknya.

Penulis juga menemukan fakta bahwa semua sekolah dasar penggerak yang diteliti memiliki kelompok/ grup koordinasi antara tenaga pendidik (guru) dengan orangtua/ wali murid. Bahkan, ada yang berbentuk paguyuban. Hal ini tentunya dapat mempermudah komunikasi demi tercapainya kolaborasi antara tenaga pendidik di sekolah dan di rumah untuk perkembangan peserta didik. Rata-rata tenaga pendidik menyampaikan bahwa keluhan orangtua/ wali murid bertumpu pada sikap anak pasca pandemi Covid19, bukan berupa penolakan terhadap esensi kurikulum baru ini. Tentunya hal ini masih dapat diatasi dengan solusi konkret jangka menengah (pola ajar) maupun panjang (transformasi dan adaptasi teknologi pendidikan) yang dirancang satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh tenaga pendidik di lapangan.

Hal terakhir yang ingin dibahas penulis pada poin ini ialah dampak efektivitas yang sudah dirasakan dan yang akan dirasakan. Penulis menemukan fakta bahwa dalam penerapan kurikulum baru ini, anak/ peserta didik dan orangtua/ wali murid ikut serta berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan pendidikan di satuan pendidikan sampel penelitian

Penulis juga menemukan dampak penerapan kurikulum ini terhadap adaptasi perkembangan teknologi pendidikan di satuan pendidikan dasar, khususnya sekolah penggerak sebagai sampel penelitian. Hubungan dengan kesiapan teknologi ditemukan pada pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar/ PMM dalam melakukan analisis awal kelebihan dan kekurangan peserta didik sebelum tahun ajaran baru yang dilakukan via online, nantinya setelah murid mengisi asesmen, guru dapat dengan mudah membedakan karakteristik setiap murid yang berbeda-beda dengan perlakuan yang berbeda-beda juga.

Memang dampak secara konkret/ riil Kurikulum Merdeka ini baru dapat dirasakan

pada tahun 2025 ketika ada penilaian Programme International Students Assesment/ PISA yang dilakukan oleh Organization for Economic Co-operation and Development/ OECD yang dilakukan setiap 3 tahun sekali pada anak berumur 15 dalam mengukur kemampuan matematika, sains, dan literasi membaca. Tentunya banyak pihak termasuk penulis mengharapkan kemajuan bangsa Indonesia pada peringkat pendidikan dengan diterapkannya instrumen kurikulum baru ini dalam membantu mengadaptasi perkembangan teknologi pendidikan kedepannya.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kurikulum yang baru disahkan pada tahun 2022 ini baru dalam tahap proses adaptasi dan penyesuaian awal di lapangan, justru ada banyak satuan pendidikan, khususnya di tingkat satuan sekolah dasar yang sangat terbantu dengan adanya Program Sekolah Penggerak dalam mempercepat transformasi dengan teknologi pendidikan. Program Sekolah Penggerak ini dirintis untuk mempercepat langkah transformasi di setiap satuan pendidikan agar dapat segera melaksanakan Kurikulum Merdeka secara utuh dan menyeluruh, namun, karena keterbatasan anggaran dan biaya, maka dilaksanakan seleksi yang cukup ketat yang bertumpu pada kemampuan kepala sekolah sebagai ujung tombak keberhasilan satuan pendidikan di lapangan.

Anggapan awal penulis bahwa Program Sekolah Penggerak merupakan garda terdepan/ contoh teladan dalam implementasi Kurikulum Merdeka yang pasti sudah siap dalam melaksanakan kurikulum baru ini di lapangan tidak sepenuhnya benar. Masih banyak kekurangan yang ditemukan oleh penulis di satuan pendidikan dasar sebagai sampel penelitian seperti kesiapan sumber daya manusia tenaga pengajar dan kepala

sekolah. Hal ini tentunya menjadi tantangan kedepan dalam proses adaptasi dengan teknologi pendidikan di satuan pendidikan dasar seperti penggunaan Platform Merdeka Mengajar/ PMM dan aplikasi serupa terkait dengan instrumen pembantu digitalisasi pendidikan.

Dalam temuannya, peneliti menemukan bahwa tidak terjadi penolakan yang berarti dari tenaga pendidik maupun orang tua terhadap penerapan kurikulum baru ini, hal ini berdampak bahwa walaupun kurikulum ini kurang mendapat dukungan dari pihak internal/ eksternal di berbagai satuan pendidikan, namun, kurikulum ini dapat terus berjalan karena dorongan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait, khususnya di Kabupaten Boyolali. Pola ketergantungan pelaksanaan kurikulum antara satuan pendidikan dengan lembaga internal dan eksternal ini juga dinilai masih sangat tinggi karena masih berada di tahap awal/ proses pertama dalam implementasi di tahun pertama. Hubungan keterkaitan antar elemen juga sudah mulai dirasakan khususnya pada beberapa sekolah dasar penggerak melalui komunikasi antar tenaga pendidik dengan pihak internal maupun eksternal, serta optimalisasi penggunaan IPTEK dan IPTIK dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas salah satunya dengan Platform Merdeka Mengajar/ PMM.

SARAN

-) Ketidaksiapan tenaga pendidik dan satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum baru ini dapat diatasi dengan revolusi pola pikir/ mindset yang akan menentukan pemikiran, perilaku dan respons seseorang maupun sekelompok orang terhadap perubahan.
-) Setiap elemen harus terus menjadi pembelajar sejati yang punya kegigihan serta passion yang kuat

(grit). Menurut Angela Durkworth (2016), orang yang memiliki bakat akan dikalahkan oleh orang yang memiliki grit karena orang itu memiliki tujuan, harapan, minat dan ikhtiar

-) Transformasi pendidikan harus terus berlanjut dengan penerapan IPTEK dan IPTIK hingga guru dapat menjadi sumber inspirasi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa “Guru yang biasa bisa menyampaikan, guru yang baik bisa menjelaskan, guru yang luar biasa dapat menginspirasi, menggerakkan hati, pikiran dan tindakan orang lain”
-) Tenaga pendidik harus memiliki Growth Mindset yang yakin bahwa dirinya berubah, baik kemampuan, bakat, kebiasaan bahkan IQ. Mereka umumnya akan mempunyai kekuatan kemauan tinggi yang berani bermimpi dan bercita-cita besar.
-) Tenaga pendidik dan peserta didik dapat menumbuhkan sikap rasa memiliki/saling memiliki (sense of belonging) dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang sudah ada dan yang akan ada.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95-101.

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Alfaeni, D. K. N. (2022). KESIAPAN GURU DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM MERDEKA PADA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK: Studi Kasus di SD Negeri Baros (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877-5889.

Aprima, D., & Sari, S. (2022). Analisis penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum merdeka pada pelajaran matematika SD. *Cendikia: Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 13(1), 95-101.

Barlian, U. C., & Solekah, S. (2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(12), 2105-2118

Feriyanto, F., Putri, R. O. E., & Afkar, T. (2022). Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Mojojoto Jetis Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, 1(1), 142-148.

Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1617-1620. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia

Fitriyah, C. Z., & Wardani, R. P. (2022). Paradigma Kurikulum Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 12(3), 236-243.

Hattarina, S., Saila, N., Faradilla, A., Putri, D. R., & Putri, R. G. A. (2022, August). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Lembaga Pendidikan. In *SEMINAR NASIONAL SOSIAL, SAINS, PENDIDIKAN, HUMANIORA (SENASSDRA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 181-192).

Hidayat, A. (2017). Kesenjangan sosial terhadap pendidikan sebagai pengaruh era globalisasi. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Indarta, Y., Jalinus, N., Waskito, W., Samala, A. D., Riyanda, A. R., & Adi, N. H. (2022). Relevansi kurikulum merdeka belajar dengan model pembelajaran abad 21 dalam perkembangan era society 5.0. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 3011-3024.

Jojo, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis kurikulum merdeka dalam mengatasi learning loss di masa pandemi Covid-19 (analisis studi kasus kebijakan pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5150-5161.

Jusuf, H., & Sobari, A. (2022). Pembelajaran Paradigma Baru Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar: Pembelajaran Paradigma Baru Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 5(2), 185-194.

Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1-13.

Mustadi, A. (2020). Landasan pendidikan sekolah dasar (Vol. 174). UNY Press. Hlm 2-5

Nahrawi, M., Alwi, A., & Ibrahim, A. (2021). NETWORK ADMINISTRATIVE ORGANIZATION DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKTOR PUBLIK. STUDI KASUS: IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. *NUSANTARA:*

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2538-2548.

Nugraha, T. S. (2022). Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Krisis Pembelajaran. *Inovasi Kurikulum*, 2, 160. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jik.v19i2.45301>

Nurmitasari, N., Kayyis, R., Astuti, R., & Khasanah, B. A. (2022). SOSIALISASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI SD NEGERI 02 BANGUNSARI. *Bagimu Negeri: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 96-104.

Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174-7187.

Ramadhan, M. A. (2022). Pengaruh iptek terhadap pendidikan di dunia pendidikan.

Rezeki, A. N. A., Alwi, A., & Lambali, S. (2022). Manajemen Jaringan dalam Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 14230-14240.

Samulowitz, A., Gremyr, I., Eriksson, E., & Hensing, G. (2018). "Brave men" and "emotional women": A theory-guided literature review on gender bias in health care and gendered norms towards patients with chronic pain. *Pain Research and Management*, 2018.

Sista, T. R., & Al Baqi, S. (2018). Pengentasan Kesenjangan Pendidikan Serta Pemberdayaan Masyarakat Panti Asuhan Kabupaten Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 2(1), 33-48.

Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 8248-8258.

Sunarni, S., & Karyono, H. (2023). Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 5(2), 1613-1620.

Sunarni, S., & Karyono, H. (2023). Persepsi Guru Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Journal on Education*, 5(2), 1613-1620.

Syahrani, A. N., & Nurani, F. (2019). Kesenjangan Mutu Pendidikan Antara Desa Dan Kota.”.

Yunaini, N., Rukiyati, R., Prabowo, M., Hassan, N., & Hermansyah, A. (2022). The Concept of the Independent Learning Curriculum (Merdeka Belajar) in Elementary Schools in View Progressivism Educational Philosophy. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 8(2), 95-105.

Yunaini, N., Rukiyati, R., Prabowo, M., Hassan, N., & Hermansyah, A. (2022). The Concept of the Independent Learning Curriculum (Merdeka Belajar) in Elementary Schools in View Progressivism Educational Philosophy. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 8(2), 95-105.

Zahir, A., Nasser, R., Supriadi, S., & Jusrianto, J. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SD Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal IPMAS*, 2(2), 1-8.

Zzulfa, Z., Rohmah, K., & Widyaningrum, A. (2022, September). Efektivitas Penggunaan Platform Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Daring. In *Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran (Vol. 2, No. 1, pp. 34-44)*.

Buku

- Anas, Zulfikri., Supriyatna, Akhmad. 2014. "Hitam-Putih Kurikulum 2013". AMP Press & Pustaka Bina Putera:Jakarta
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar.Hlm 231
- Cresswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*: Sage Publications. Hlm 189
- Dalio, R. (2021). *Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed Or Fail*. Simon and Schuster.
- Hatta, Muhammad.(1956). *Buku Peringatan 30 Tahun Taman Siswa (1922-1952)*. Pertjetakan Taman Siswa: Jogjakarta. hlm 22-28
- Limb, P. (2008). *Nelson Mandela: a biography*. ABC-CLIO. Hlm 230
- Lutfi, M., & Fathani, A. H. (2013). *Hitam putih pendidikan: menyingkap realitas, merajut solusi*. Universitas Brawijaya Press.
- Mulyasa, H. E. (2021). *Implementasi kurikulum 2013 revisi: dalam era industri 4.0*. Bumi Aksara. Hlm 28
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo. Hlm.15- 18; 31-34.
- Nugroho. Riant. (2018). "Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik". PT Elex Media Komputindo Gramedia: Jakarta. Hlm 7-10
- Oesman, Oetojo, (1990). "Bahan Penataran P4, UUD 1945 dan GBHN". Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7 Pusat). Percetakan Negara RI:Jakarta.Hlm. 35.
- Qurtubi, H. A. (2020). *Perbandingan Pendidikan*. Jakad Media Publishing.Hlm 6-7
- Rahardjo, Suparto. 2009. *Ki Hajar Dewantara; Biografi Singkat 1889-1959*. GARASI: Jogjakarta. Hlm 67-75
- Shobirin, M. A. (2016). *Konsep dan implementasi kurikulum 2013 di sekolah dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Stake, R. (1995). *Seni dalam Studi Kasus*. Thousand Oaks, CA: Sage
- Tempo. 2022. "Menarik Kembali Kurikulum 2013". Pusat Data dan Analisa Tempo, Tempo Publishing
- Yunus, M., Sos, S., Aljurida, A. A., & KP, S. I. M. A. (2021). *Hitam putih kebijakan publik di Indonesia*. Penerbit Adab. Hlm 95-99
- Koran cetak dan digital
- Hidayat, Komaruddin. (2023) Beradaptasi memanfaatkan perkembangan teknologi. *Koran Kompas Edisi 28 Juni 2023*. Hlm 6.
- Latif, Yudi. (2023). "Perkuat Kapabilitas Sejak Pendidikan Dasar" *Koran Kompas Edisi 28 Juni 2023*. Hlm 16.
- Prabowo, Harjanto, (2023). *Manusia Unggul, Bonus Demografi, dan Transformasi Digital*. *Koran Kompas edisi 28 Juni 2023*. Hlm 7
- Rahmadi, Imam Fitri. (2023). *Merdeka Belajar Sejak Dini*. Kompas.id. Diakses pada 16/08/2023.
- Rosyidi, Unifah, (2023). "Pendidikan di Era AI: Membawa Keanusiaan Lebih Mulia". *Koran Kompas edisi 28 Juni 2023*. Halaman 4.
- Sinaga, Tatang. Mulyana. 2023. "Teknologi Digital Dukung Transparansi Pengelolaan Dana BOS". Kompas.id. 7 Agustus 2023. Diakses pada 12/08/2023.

Yulaelawati, Ella. (2023). "Mengajar Generasi Alfa". Koran Kompas Edisi 26 Juli 2023. Hlm 7.

Website berita dan laman resmi pemerintah

Aisyah, Novia (2022). "Kurikulum Prototipe Dikritik, Kemendikbud: Uji Publik Sudah Dilakukan." Detik.com. 29 Januari 2022, Diakses pada 25/07/2023.

Apjii.or.id . (2023). "Survei APJII Pengguna Internet Indonesia Tembus 215 juta Orang". Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Diakses pada laman <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>. Diakses pada 25/07/2023

BPS.go.id. 2023. "Metode Baru : Rata-rata Lama Sekolah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2020-2023. Diakses pada laman <https://boyolalikab.bps.go.id/indicator/26/407/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah-eks-karesidenan-surakarta.html>. Diakses pada 20/02/2023.

BPS.go.id. 2023. "Metode Baru : Indeks Pembangunan Manusia Eks- Karesidenan Surakarta 2020-2022. Diakses pada laman <https://boyolalikab.bps.go.id/indicator/26/400/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-eks--karesidenan-surakarta.html>. Diakses pada 20/02/2023.

BPS.go.id. 2023. IPM D.I. Yogyakarta. Diakses pada laman: <https://yogyakarta.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>. Diakses pada 28/03/2023

BPS.go.id. 2023. IPM Jawa Tengah. Diakses pada laman : <https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/2/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru.html>. Diakses pada 28/03/2023.

BPS.go.id. 2023. "Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2023". Diakses pada laman: <https://boyolalikab.bps.go.id/publication.html> . Diakses pada 20/06/2023.

Charismiadji, Indra (2022. April 22). TIDAK ADA YANG SALAH DENGAN GONTA GANTI KURIKULUM, SEKADAR PERTANDA KETIDAKWARASAN SAJA (Video). Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=J6z7XTBdGuQ>

Harusisilo. Y.H. (2019). "Skor PISA Terbaru Indonesia, Ini 5 PR Besar pada Era Nadiem Makarim". Diakses pada laman <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/04/13002801/skor-pisa-terbaru-indonesia-ini-5-pr-besar-pendidikan-pada-era-nadiem-makarim?page=all>. Diakses pada 20/02/2023.

Kemdikbud. 2017. APK dan APM. Diakses pada laman <https://apkpm.data.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 21/03/2023.

Kemendikbud. 2023. Data Pokok Pendidikan. Dirjen PAUD, SD, SMP. Diakses pada laman <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>. Diakses pada 20/02/2023.

Kemendikbud. 2023. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Platform Merdeka Mengajar (PMM). Diakses pada laman <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/sections/14143618762393-Projek-Penguatan-Profil-Pelajar-Pancasila-P5>. Diakses pada 26/07/2023.

Kemendikbudristek. 2023. Lokasi Program Sekolah Penggerak. Diakses pada laman

<https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/implementasi-bsp>. Diakses pada tanggal 26/04/2023.

Kemendikbudristek. 2023. Detail Program Sekolah Penggerak. Diakses pada laman <https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/detail-program/persyaratan>. Diakses pada tanggal 15/02/2023

Mahdi. M. (2022). “Kompetensi Siswa di Indonesia Masih Rendah”. DataIndonesia. Diakses pada laman <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kompetensi-siswa-di-indonesia-masih-rendah>. Diakses pada 20/02/2023.

Pemerintah Kabupaten Boyolali. 2021. “Indeks Daya Saing Daerah/ IDSD Kabupaten Boyolali”. Diakses pada laman https://ppid.bojolali.go.id/index.php/ft_infopublik/showdoc/Laporan%20IDSD%20Tahun%202021%20Kab%20Boyolali%20%28final%29.pdf. Diakses pada 20/02/2023. Hlm 11.

Tim Penyusun Visi Indonesia 2045, Visi Indonesia 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019, halaman IV. Diakses pada 5/9/2022

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan dibawahnya

Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. LN.2003/NO.78, TLN NO.4301, LL SETNEG. Jakarta

Permendikbud. 2022. “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi

Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah.